

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 4 informan yakni Kabiro Pemberitaan Parlemen DPR RI, Kasubag Media Sosial DPR RI, Staf Media Sosial DPR RI Bagian Redaktur, serta Staf Media Sosial DPR RI Bagian Riset, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan media sosial @dpr_ri oleh Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI telah dijalankan secara terencana dan sistematis sebagai bagian dari komunikasi publik institusional. Media sosial dimanfaatkan tidak hanya sebagai sarana publikasi, tetapi sebagai kanal strategis untuk membuka akses informasi kinerja DPR RI kepada publik, khususnya terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa transparansi kinerja yang diwujudkan melalui media sosial DPR RI bersifat informatif dan terkelola. Keterbukaan informasi dilakukan secara luas dan terstruktur, namun tetap berada dalam kendali institusional melalui mekanisme editorial, kurasi konten, serta pertimbangan etika komunikasi lembaga. Kondisi ini menyebabkan transparansi yang dihasilkan belum sepenuhnya berkembang ke arah transparansi dialogis yang melibatkan partisipasi publik secara intens dan berkelanjutan.

Ditinjau dari perspektif Teori *Excellence Public Relations*, praktik pengelolaan media sosial DPR RI telah mencerminkan upaya organisasi dalam memenuhi kebutuhan publik strategis (*strategic constituencies*) serta menjaga akuntabilitas komunikasi. Akan tetapi, keseimbangan antara tuntutan keterbukaan dan kehati-hatian institusional membuat praktik transparansi lebih menekankan penyampaian informasi (*Public Information Model*) dibandingkan pembangunan komunikasi dua arah yang simetris dan dialogis antara lembaga dan publik.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang *public relations* pemerintah, pengelolaan media sosial institusional, dan transparansi kinerja lembaga publik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji transparansi kinerja dari perspektif audiens atau publik guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas komunikasi digital lembaga negara dalam membangun keterbukaan dan kepercayaan publik.

5.2.2. Saran Praktis

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti kepada Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI, khususnya Sub Bagian Media Sosial, adalah perlunya penerapan pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif, dialogis, dan berorientasi pada keterlibatan publik dalam rangka memperkuat transparansi kinerja lembaga. Untuk itu, peneliti menyarankan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan secara konkret yakni:

- a) Mengoptimalkan pemanfaatan fitur-fitur interaktif yang tersedia pada platform media sosial, seperti kolom komentar, *polling*, *question box*, *live streaming*, dan sesi tanya jawab terjadwal sebagai sarana untuk menampung aspirasi dan pertanyaan publik secara lebih terstruktur.
- b) Memberikan edukasi dan himbauan secara berkelanjutan kepada publik mengenai pilar-pilar konten yang diterapkan dalam pengelolaan media sosial, termasuk makna dan fungsi sistem *color coding* pada setiap jenis konten guna memperkuat pemahaman publik terhadap informasi kinerja yang disampaikan.